KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI PENYU TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga keberadaan serta keberlangsungan kehidupan penyu, perlu disusun rencana aksi nasional konservasi penyu tahun 2022-2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI PENYU TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut RAN Konservasi Penyu.

KEDUA : RAN Konservasi Ikan Penyu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : RAN Konservasi Penyu sebagaimana dimaksud dalam

https://jdih.kkp.go.id/

diktum KESATU ditujukan untuk jenis penyu yang terdiri dari:

a. penyu bromo (*Caretta caretta*);
b. penyu hijau (*Chelonia mydas*);
c. penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*);
d. penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*);
e. penyu pipih (*Natator depressus*); dan
f. penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*).

KEEMPAT : RAN Konservasi Penyu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan konservasi penyu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Pelaksanaan RAN Konservasi Penyu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

KEENAM : Pelaksanaan RAN Konservasi Penyu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dievaluasi setiap 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui apabila berdasarkan hasil evaluasi memerlukan perubahan.

KETUJUH : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan RAN Konservasi Penyu dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggaran masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pihak terkait lainnya, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Edin Martiana

https://jdih.kkp.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI PENYU
TAHUN 2022-2024

RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI PENYU TAHUN 2022-2024

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
Sasaran I: **Tersedianya Data Kajian dan Riset Penyu**										
1.	Penguatan kajian dan riset penyu	1. Melakukan kerja sama survei, kajian, dan/atau riset penyu	Terlaksananya kerja sama dengan *stakeholder* terkait	Dokumen kerja sama	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan
		2. Melakukan pendataan/ monitoring rutin	Terlaksananya pendataan/ monitoring	Data dan informasi hasil	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera				Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Badan

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
		pendaratan penyu (antara lain: jumlah sarang, jumlah telur, jumlah tukik, sex ratio)	pendaratan jumlah sarang, jumlah telur, jumlah tukik, sex ratio	pendataan/ monitoring	Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat				(Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
		3. Melakukan kajian dan/atau riset penyu (misalnya: estimasi tren populasi, genetik, daya tetas, koridor migrasi, sex ratio, *bycatch*)	Terlaksananya kajian estimasi tren populasi, genetik, daya tetas, koridor migrasi, sex ratio, *bycatch*	Data dan informasi hasil survei, kajian, dan/atau riset	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,				Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
					Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat					
2.	Penguatan hasil kajian dan riset Penyu	4. Menyiapkan sistem data informasi konservasi penyu	Tersedianya sistem data informasi konservasi penyu	Sistem data informasi konservasi penyu	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
		5. Mengunggah dan mengintegrasikan data dan informasi penyu, data dan informasi hasil survei, kajian, dan/atau riset penyu ke dalam sistem informasi	Tersajinya data dan informasi penyu yang terintegrasi	Data dan informasi penyu hasil unggahan yang terintegrasi	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional,

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
										perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
		6. Menyelenggarakan rilis publik/ diseminasi hasil pengumpulan data penyu	Terlaksananya diseminasi data dan informasi penyu	Publikasi hasil pengumpulan data penyu antara lain dalam bentuk buku, artikel ilmiah, dan publikasi nautika	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pushidrosal TNI-AL, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
3.	Pendokumentasian koridor jalur migrasi penyu	7. Melakukan pemutahiran jalur migrasi penyu	Terpetakannya wilayah pergerakan penyu	Peta jalur migrasi penyu	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pushidrosal TNI-AL, perguruan tinggi,

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
										dan organisasi kemasyarakatan
		8. Menginisiasi pengusulan calon kawasan konservasi dengan penyu sebagai target konservasi	Terinisiasinya pembentukan kawasan konservasi di wilayah koridor migrasi penyu	Dokumen usulan/hasil pembahasan inisiasi kawasan konservasi dengan penyu sebagai target konservasi	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
Sasaran II: **Terlindunginya Habitat Peneluran/Koridor Migrasi Penyu**										
4.	Penguatan Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut	9. Menetapkan habitat penyu sebagai target konservasi	Terbitnya regulasi yang menetapkan habitat penyu sebagai target konservasi	Dokumen regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait habitat penyu sebagai target konservasi	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Kementerian Dalam Negeri, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
		10. Mengintegrasikan jalur migrasi penyu dalam dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir	Terintegrasikannya jalur migrasi penyu dalam dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir	Dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Kementerian Dalam Negeri, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
Sasaran III: **Terwujudnya Upaya Pengelolaan Perlindungan dan Pelestarian Penyu Secara Terpadu**										
5.	Penguatan koordinasi pengelolaan penyu	11. Melakukan pertemuan rutin penyelarasan kegiatan konservasi penyu	Terlaksananya pertemuan rutin penyelarasan kegiatan konservasi penyu	Resume hasil pertemuan dan tindak lanjut	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
										Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan
		12. Membentuk forum komunikasi respon cepat pengelolaan penyu	Terbentuknya forum komunikasi respon cepat pengelolaan penyu	Forum komunikasi respon cepat pengelolaan penyu yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit pelaksana teknis	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
					Maluku, Papua Barat					perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
6.	Penguatan koordinasi penanganan kasus penyu (*bycatch*/ terdampar/kasus pelanggaran hukum)	13. Melakukan pertemuan rutin anggota forum komunikasi respon cepat pengelolaan penyu	Terlaksananya pertemuan rutin anggota forum komunikasi respon cepat pengelolaan penyu	Resume hasil pertemuan dan tindak lanjut	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
		14. Melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap	Terlaksananya pemantauan dan penegakan hukum terhadap	Tingkat pelanggaran menurun	Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu,				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
		pelanggaran atau penyelundupan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*) secara rutin/insidentil (sidak/investigasi)	pelanggaran atau penyelundupan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*) secara rutin/insidentil (sidak/ investigasi)		Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat				Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)	Pengelolaan Ruang Laut, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan
Sasaran IV: **Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Penyu**										
7.	Pembinaan wisata penyu berbasis masyarakat	15. Membentuk kelompok masyarakat peduli konservasi penyu	Terbentuknya kelompok masyarakat peduli konservasi penyu	Surat Keputusan kepala dinas/kepala unit pelaksana teknis/kepala desa/pimpinan setempat tentang pembentukan kelompok masyarakat peduli konservasi penyu	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
					Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat					
		16. Melakukan bimbingan teknis wisata penyu bagi masyarakat pengelola wisata penyu	Terlaksananya bimbingan teknis wisata penyu bagi masyarakat pengelola wisata penyu	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola wisata penyu	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
8.	Peningkatan partisipasi publik dalam konservasi penyu	17. Melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam penanganan kejadian penyu terdampar dan kejadian penyu hasil tangkapan sampingan (*bycatch*)	Terlaksananya bimbingan teknis kepada masyarakat dalam penanganan kejadian penyu terdampar dan kejadian penyu hasil tangkapan sampingan (*bycatch*)	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan kasus penyu terdampar dan kejadian penyu hasil tangkapan sampingan (*bycatch*)	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan
		18. Melibatkan masyarakat dalam aksi konservasi dan rehabilitasi habitat penyu di wilayah pesisir (antara lain: adopsi penyu/sarang)	Terlibatnya masyarakat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi habitat penyu di wilayah pesisir	Peran serta masyarakat dalam konservasi penyu	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur,				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
					Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat					dan Perikanan), Badan Riset dan Inovasi Nasional, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan
		19. Memberikan bantuan konservasi penyu bagi kelompok masyarakat	Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan konservasi penyu bagi kelompok masyarakat	Tersedianya sarana prasarana konservasi bagi kelompok masyarakat	Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
Sasaran V: **Terwujudnya Upaya Penyelamatan Penyu Sakit/Terdampar**										
9.	Peningkatan tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) penyu sakit/terdampar/ terjerat	20. Menyelamatkan penyu sakit/terdampar/ terjerat	Terlaksananya penyelamatan penyu sakit/ terdampar/terjerat	Penyu sakit/ terdampar/ terjerat tertangani dengan baik	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan), pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan
		21. Menyiapkan tempat rehabilitasi sementara untuk pengobatan penyu	Tersedianya tempat rehabilitasi sementara yang representatif untuk pengobatan penyu	Tempat rehabilitasi sementara untuk pengobatan penyu	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
										Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga konservasi
		22. Melepasliarkan penyu kembali ke laut	Terlaksananya pelepasliaran penyu yang telah sehat kembali ke laut	Jumlah penyu yang dilepasliarkan	Nasional				Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan,

https://jdih.kkp.go.id/

No	Strategi	Aksi	Indikator	*Output*	Lokasi Prioritas	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/Unit Kerja Terkait
										dan lembaga konservasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Elin Martiana

https://jdih.kkp.go.id/